**PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

DEVITA AYU PUTRI DESTIAWAN

IIK STRADA INDONESIA

devritaayu1@gmail.com

ABSTRAK

Ideologi dalam kehidupan kita sebagai negara dapat diartikan sebagai konsensus mayoritas warga tentang dasar nilai-nilai yang ingin mereka wujudkan dengan mendirikan negara. Dalam hal ini, sering juga disebut sebagai philosophische grondslag atau weltanschauung, yaitu pemikiran dan keinginan terdalam warganya untuk mendirikan negara. Ideologi dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi dari nilai-nilai keramat Indonesia sebagai bangsa, menempatkan manusia pada martabat yang tinggi sebagai makhluk yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran menjalankan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Seperti yang diabadikan dalam pembukaan untuk UUD 1945, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghormati apapun upaya suatu bangsa untuk menggariskan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan ideologi masing-masing. Dalam hal ini, Indonesia sebagai bangsa akan menjunjung dan menegakkan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara untuk tetap dipegang teguh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kata Kunci : Ideologi, Pancasila, Hak Asasi Manusia, Negara

A. Latar Belakang

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan ideologi. Dimana suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan tersebut. Sehingga konsep dasarnya ialah pikiran-pikiran yang didalamnya terkandung gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik yang dicita-citakan suatu bangsa, dan sudah diyakini kebenarannya jika dapat menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara, dalam hal ini sering juga disebut filosofische grondslag atau weltanschauung yang merupakan pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam warga negaranya, untuk diatasnya didirikan suatu negara.

Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pedoman dalam semua kegiatan/aktivitas hidup di segala bidang, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, kesusilaan, dan norma sopan santun.

Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sarana ampuh dalam mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan

kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran Pancasila sebagai ideologi negara, meskipun berjalan alot, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan berlangsung secara signifikan. Berbeda dengan proses kelahirannya, upaya “membumikan” Pancasila di tengah bangsa Indonesia ternyata banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa-masa awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tantangan terhadap eksistensi Pancasila tidak hanya bersifat internal tapi juga bersifat eksternal. Berpijak pada realitas adanya berbagai tantangan dan ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara sejak masa-masa awal kelahirannya, bisa dipastikan bahwa tantangan dan ancaman terhadap Pancasila akan terus berlangsung. Maka dari itu, mau tidak mau, apabila Pancasila ingin tetap eksis di bumi Nusantara ini perlu selalu dipersiapkan jawaban (respons) yang tepat atas berbagai tantangan yang tengah dan akan terjadi.

B. Kasus/Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah:

“Apakah Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Hak Asasi Manusia Dapat Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? “

C. Tinjauan Pustaka

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan ideologi negara dihubungkan dengan fungsinya sebagai dasar negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia dapat disebut pula sebagai Ideologi Nasional atau lebih tepat lagi ideologi negara. Artinya Pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau dapat dimonopoli oleh seseorang, ataupun sesuatu golongan masyarakat tertentu. Sebagai dasar filsafat atau dasar kerohanian negara, yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan.

D. Pembahasan

Filsafat merupakan suatu ajaran nilai atau kebenaran yang dijadikan keyakinan atau ideologi suatu bangsa. Bagi suatu bangsa, kebenaran ini dijadikan dasar negara atau ideologi negara. Ideologi berasal dari kata *ideo* yang berarti cita-cita dan *logy* yang berarti pengetahuan, ilmu dan paham. Menurut W. White, definisi dari ideologi adalah: *the sum of political ideas or doctrines of a distinguishable class or group of people*; artinya: ideologi adalah soal cita-cita politik atau doktrin atau ajaran suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Sedangkan menurut pendapat Harol. H. Titus, yang dikutip dari C.ST. Kansil, definisi dari itu adalah: *a term used for any group of ideas concerning various*

political and economic issues and social philosophies often applied to a systematic scheme of ideas held by groups or classes; artinya: suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat. Jadi, bila definisi-definisi ini diterapkan pada Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu adalah hasil usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menganggap sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia Indonesia yang secara sungguh-sungguh dan sistematis, kemudian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas, dan pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan suatu negara Indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila. Pancasila yang dikemukakan dalam Sidang I BPUPKI pada 1 Juni 1945 adalah dimaksudkan untuk menjadi dasar dari negara Indonesia Merdeka.

E. Kesimpulan

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan ideologi negara dihubungkan dengan fungsinya sebagai dasar negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia dapat disebut pula sebagai Ideologi Nasional atau lebih tepat lagi ideologi negara. Artinya Pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau dapat dimonopoli

oleh seseorang, ataupun sesuatu golongan masyarakat tertentu. Sebagai dasar filsafat atau dasar kerohanian negara, yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan. Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengamatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad mengikuti ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Himpunan Peraturan

Perundangundangan yang terkait dengan HAM, MA RI 2000

Jimly Asshiddiqie , Edisi revisi 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Perss.

Kaelan ,2002, Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi, Paradigma Yogyakarta

Kansil, Christine S.T Kansil, 2005, Pancasila dan UUD 1945, Pradnya Paramita.

Subandi AL Marsudi , Edisi Revisi 2006, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suryatni. L. 2014. Diklat pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6 ,Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2014 di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.

Sodik, M. A., Suprpto, S. I., & Pangesti, D. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Di Rsui Orpeha Tulungagung. STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2(1), 24-32.